

Bogor Bisa!

Jangan Takut

Bersuara

Oleh: Hutami Pudya Mulyani

Karena wanita ingin dimengerti. Lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti. Manjakan dia... dengan kasih sayang - Ada Band

Betapa senangnya jika semua perempuan dapat merasakan hal yang sama seperti penggalan lirik lagu Ada Band tersebut. Dimengerti, diberikan kasih sayang. Namun nyatanya, tak semua perempuan bisa mendapatkan hal tersebut, terutama dari pasangannya.

Perempuan memang identik dengan sosok yang lembut, penuh kasih sayang, sangat mudah memaafkan dan sering mengalah. Sebagian orang malah menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah dan tak berdaya. Persepsi itu, kerap menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Terbukti dengan masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Merujuk dari data yang diperoleh dari Catatan Tahunan 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil didokumentasikan mencapai 16.217 kasus. Jumlah tersebut di-himpun dari 232 lembaga mitra dari 34 provinsi di Indonesia. Terdapat tiga provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu: DKI Jakarta 20% (3.320), Jawa Timur 11% (1.785), dan Jawa Barat 9% (1.540).

Ketiga provinsi tersebut terletak di Pulau Jawa yang sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang relatif baik. Informasi pun lebih mudah diakses sehingga kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan juga relatif baik. Seperti fenomena puncak gunung es, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak terdokumentasi.

Sementara di Bogor, pelanggaran Undang-Undang No. 23 tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polres Bogor Kota masih di atas 40 kasus.

Melihat kondisi ini, Dr. Agnes Setyowati, M. Hum menguraikan berbagai penyebab utama tingginya kasus KDRT. "Kasus KDRT di Bogor termasuk yang paling sering terjadi dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dalam bentuk kekerasan psikis atau fisik. Penyebab utama terjadinya KDRT ini mungkin dapat kita soroti dari beberapa aspek," ujar Agnes, begitu ia biasa disapa.

Agnes menyebut minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender menjadi salah satu penyebab utama. Kuatnya

sistem patriarki yang berkembang di suatu daerah sering kali membuat perempuan berpikir bahwa kekerasan yang mereka alami adalah sebagai konsekuensi alamiah yang lazim terjadi kepada mereka sebagai kelom-



DR. AGNES SETYOWATI, M. HUM

pok subordinat yang secara sosial berada di bawah laki-laki.

"Ironisnya adalah terkadang sistem yang patriarkal ini beriringan dengan pemahaman agama yang ditafsirkan secara tidak utuh. Padahal kalau memang kita ingin mengacu

kepada ajaran agama, banyak sekali sebetulnya penafsiran yang sifatnya memuliakan perempuan sebagai makhluk yang posisinya setara dengan kaum laki-laki.” ungkap perempuan yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan.

Faktor ekonomi, tambah Agnes, juga menjadi salah satu penyebab utama KDRT.

mereka mengalami kekerasan.

Dalam lingkup kebijakan, pemerintah bukan tidak memiliki perangkat. Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2015 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor, belum menjamin sepenuhnya pengentasan KDRT. Meski begitu, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor cukup

mal. Agnes menuturkan, hal ini disebabkan oleh masih belum meratanya pemahaman tentang peraturan pemerintah yang melindungi perempuan. Dibuatnya peraturan saja tidaklah cukup.

Agnes menambahkan, perlu adanya gerakan-gerakan dari pemerintah pusat dan daerah yang secara intensif dilakukan dan diterapkan di masyarakat untuk membangun pemahaman kritis mengenai pentingnya kesetaraan gender. Pemerintah juga wajib menggalakkan sanksi hukum atas segala kekerasan berbasis gender demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi perempuan. “Harus ada kerjasama yang solid antara pemerintah, penegak hukum, aktivis perempuan, aktivis HAM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa kekerasan berbasis gender - termasuk KDRT, adalah bentuk kejahatan yang wajib dan mutlak untuk diberikan sanksi hukum,” kata Lulusan Program Doktor Ilmu Susastera Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Bogor memang belum sepenuhnya aman bagi perempuan jika dilihat dari data statistik



HENDY NOVIAN

Tingginya angka pengangguran dewasa ini kerap menjadi pemicu meningkatnya kasus KDRT. “Konsep keluarga batih, yang memosisikan kaum laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai istri yang mengisi ranah domestik, menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan secara finansial karena ia harus bergantung kepada laki-laki. Ketika laki-laki mengalami permasalahan ekonomi, tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh perempuan dan mereka sering kali mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh suami mereka sendiri,” paparnya.

Pendidikan rendah juga menjadi faktor penyebab KDRT. Agnes menjelaskan, pendidikan yang tidak cukup dimiliki perempuan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kuatnya ideologi patriarki yang kerap melarang perempuan mengenyam pendidikan tinggi tentunya merugikan perempuan dalam banyak hal. Rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh kaum perempuan membuat kebanyakan dari mereka menganggap sekaligus mengafirmasi stigma dan stereotip seperti perempuan ‘lemah’, ‘pasif’, ‘submisif’ sebagai takdir dan juga kodrat mereka sebagai manusia. Hal ini tentu saja merugikan karena mereka kerap kali tidak mampu melakukan tindakan ketika



HENDY NOVIAN

serius dalam melindungi perempuan. Sementara di Kota Bogor, upaya ini juga dicanumkan dalam Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 yang mengemban misi untuk menurunkan kumulatif Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan hingga 22%. “Pemerintah harus lebih jelas, tegas, dan konsisten menyuarkan segala bentuk sanksi atas kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak,” lanjut Agnes.

Tak hanya itu, penerapan peraturan dan perangkat tersebut juga dinilai belum maksi-

kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian, bukan hal yang tak mungkin Kota Bogor menjadi kota yang aman dan nyaman bagi perempuan. “Untuk memaksimalkan hal

ini, pemerintah Bogor dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) harus bekerjasama secara solid dengan Polres Bogor, badan hukum, psikolog, aktivis perempuan, aktivis HAM, dan dinas sosial demi tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi perempuan,” jelas perempuan kelahiran Banten itu. Karena itu, Agnes juga mengimbau kepada perempuan agar jangan takut bersuara menentang segala bentuk ketidakadilan termasuk kekerasan. Perempuan maupun laki-laki berhak diperlakukan adil sebagai manusia. #